

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

BUKU LAPORAN TAHUNAN

Tahun Anggaran : 1999/2000



MEMBANGUN
MANUSIA KARYA



Jalan Dukuh Menanggal No. 124-126 ☎ 8288930-8284078
SURABAYA

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

BUKU
LAPORAN TAHUNAN

Tahun Anggaran : 1999/2000



MEMBANGUN
MANUSIA KARYA

Jalan Dukuh Menanggal No. 124-126 ☎ 8288930-8284078
SURABAYA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI	
A. Bagian Tata Usaha	2
B. Bidang Binagram	5
C. Bidang Latihan dan Produktivitas	6
D. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja	8
E. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	10
F. Bidang Pengawasan dan Kesehatan Keselamatan Kerja	13
G. Balai Hiperkes dan Kesehatan Kerja	17
H. Kepaniteraan P4D Jawa Timur	19
I. Balai Antar Kerja Antar Negara	20
J. Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Jawa Timur	21
BAB III MASALAH/HAMBATAN	22
BAB IV EVALUASI/ANALISA	
A. Bagian Tata Usaha	23
B. Bidang Binagram	24
C. Bidang Latihan dan Produktivitas	25
D. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja	25
E. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	25
F. Bidang Pengawasan dan Kesehatan Keselamatan Kerja	26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	27
B. Saran	27

KATA PENGANTAR

Sebagaimana rangkuman seluruh kegiatan Rutin dan Pembangunan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, maka disusunlah Buku Laporan Tahunan untuk Tahun Anggaran 1999/2000, hal ini untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep. 157/M/SJ/1984 tanggal 01 Juni 1984.

Laporan ini merupakan hasil kegiatan Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur yang didalamnya menggambarkan tentang hasil-hasil yang telah dicapai, permasalahan yang timbul dan upaya penyelesaiannya serta saran-saran.

Buku laporan ini tersusun berkat kerjasama yang baik antar unit di lingkungan Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur.

Namun tetap disadari bahwa Buku Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Surabaya, Mei 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH



Muzni Tambusai

Dr. MUZNI TAMBUSAI
NIP. 140058574

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep, Men. 157/M/SJ/1984 tanggal 01 Juni 1984, maka disusunlah laporan tahunan tahun anggaran 1999/2000 yang meliputi kegiatan Rutin maupun Pembangunan/Proyek di jajaran Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 23 Kandeptaker, 1 Dinas Tenaga Kerja, 7 Balai, 1 Kepaniteraan P4D dan 12 LLKI/LLKUM.

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 1999/2000 masih didasarkan pada kebijaksanaan Departemen Tenaga Kerja dalam Pelita VI DASA KARYA TAMA, target dan petunjuk-petunjuk yang ada baik dalam DIK/DIP dan petunjuk-petunjuk dari Pusat. Disamping itu dalam melaksanakan kegiatannya tetap memperhatikan pula hasil-hasil dan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Secara garis besar dapat dilaporkan bahwa program dan kegiatan tahun anggaran 1999/2000 cukup berhasil sesuai yang direncanakan, bahkan beberapa hal terjadi penonjolan yang berarti, sebagai gambaran dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi keuangan fisik kegiatan rutin sampai akhir tahun anggaran cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari alokasi dana Rp.16.736.696.248,00 realisasi Rp.16.228.009.826,00 atau 96,96 %
2. Realisasi kegiatan fisik kegiatan pembangunan sampai dengan akhir tahun anggaran 1999/2000 hampir mencapai target kurang sedikit, dana yang tersedia Rp.10.322.754.000,00 realisasi Rp.10.087.260.977,00 atau 99,86 %

Selanjutnya uraian secara rinci akan dipaparkan dalam sistematika dalam bab-bab berikutnya. Adapun sistematika penyusunan laporan tahunan adalah sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI
BAB III	: MASALAH/HAMBATAN
BAB IV	: EVALUASI/ANALISA
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI

A. BAGIAN TATA USAHA

1. KEGIATAN RUTIN

a. Jumlah Pegawai menurut golongan

• Golongan IV	:	49	orang
• Golongan III	:	1.297	orang
• Golongan II	:	514	orang
• Golongan I	:	63	orang
<hr/>			
JUMLAH	:	1.923	orang

b. Jumlah Pegawai menurut jabatan fungsional

• ILK	:	440	orang
• Pegawai Ketenagakerjaan	:	156	orang
• Litkayasa	:	16	orang
<hr/>			
JUMLAH	:	612	orang

c. Jumlah Pegawai menurut tehniisi fungsional

• Pegawai Antar Kerja	:	70	orang
• Pegawai Perantara	:	54	orang
<hr/>			
JUMLAH	:	124	orang

d. Pengangkatan Pegawai menurut jabatan structural

• Eselon	:	-	orang
• Eselon	:	-	orang
• Eselon	:	8	orang
• Eselon	:	51	orang
• Eselon	:	6	orang
<hr/>			
JUMLAH	:	65	orang

e. Usulan Kenaikan Pangkat

	Usulan	Realisasi
• Golongan II/d ke bawah	: 91 orang	91 orang
• Golongan III/a ke atas	: 301 orang	286 orang
• Golongan IV	: 1 orang	1 orang
JUMLAH	: 393 orang	378 orang

f. Pemindahan Pegawai

• Antar unit di lingkungan Kanwil Depnaker	: 34 orang
• Keluar Propinsi Jawa Timur	: 10 orang
• Dari luar Propinsi Jawa Timur	: 50 orang
• Pengangkatan Pegawai	
Gol. III	: 57 orang
Gol. II	: 13 orang
Gol. I	: 9 orang

g. Permintaan Kartu Pegawai

Usulan	: 57 orang	Realisasi	: 19 orang
--------	------------	-----------	------------

h. Permintaan Kartu Istri/Suami

Usulan	: 32 orang	Realisasi	: 9 orang
--------	------------	-----------	-----------

i. Pelaksanaan Ujian Dinas UTPP

• Ujian Dinas	: 93 orang	Lulus	: 93 orang
• UTPP	: 10 orang	Lulus	: 10 orang

j. Pengembangan dan Pembinaan Pegawai

a) Mengikuti Diklat	: - orang
b) Tindakan Disiplin Pegawai	:
• Ringan	: 14 orang
• Sedang	: 8 orang
• Berat	: 7 orang

k. Ijin Cuti Pegawai diberikan kepada : 312 orang

l. Surat menyurat

- Surat Keluar : 26.823 buah
- Surat Masuk : 38.888 buah

m. Tindaklanjut Pemeriksaan

1) Wasmas

- Kasus : 116 kasus
- Selesai : 100 kasus
- Sisa : 16 kasus

2) PO Box 5000

- Kasus : 19 kasus
- Selesai : 13 kasus
- Sisa : 6 kasus

3) IRJEN

- Kasus : 32 kasus
- Selesai : 21 kasus
- Sisa : 11 kasus

4) BPKP

- Kasus : 17 kasus
- Selesai : 17 kasus
- Sisa : 0 kasus

n. Keuangan

- 2) Dana yang diperoleh dalam DIK sebesar Rp.16.736.696.248,00 meliputi Kanwil, 23 Kandep, 1 Disnaker, 7 Balai, 12 KKK dan 1 Kepaniteraan P4D dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN MA	DANA DLM DIK	REALISASI
1	Belanja Pegawai	Rp.13.285.703.038	Rp.15.827.946.695
2	Belanja Barang	Rp. 1.773.710.625	Rp. 1.752.638.932
3	Belanja Pemeliharaan	Rp. 1.533.605.000	Rp. 1.507.593.749
4	Belanja Perjalanan	Rp. 143.677.585	Rp. 139.830.450
	JUMLAH	Rp.16.736.696.248	Rp.19.228.009.826

- 3) Pelaksanaan DIK-S/DPKK TA. 1999/2000 sebesar Rp.3.064.762.500 dan realisasi Rp.2.757.165.650 atau 89 %

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN

- a. Restorasi Gedung Kandeptaker Surabaya 150 m²
- b. Pengadaan Barang
 - 1 unit komputer merk ITC
 - 1 unit printer HP Laser Jet 6L
 - 10 buah meja kerja kayu Star
 - 2 buah pompa air
 - 1 buah filling cabinet
 - 1 buah meja kerja Eselon
 - 1 buah kursi kerja Eselon
 - 1 buah type recorder merk Sony

B. BIDANG BINAGRAM

Tugas pokok Bina Program melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana dan program, penyusunan/memberikan informasi ketenagakerjaan daerah, penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah, evaluasi dan laporan, dimana pelaksanaan kegiatan ditunjang oleh dana rutin dan pembangunan.

1. KEGIATAN RUTIN

- a. Menyusun dan koordinasi penyusunan DURP dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dengan unit terkait, juklak, juknis, pembuatan DIP/PO dimana DIP/PO cukup disahkan oleh Tingkat I setempat.
- b. Menyusun dan mengkoordinir pembuatan Renlakgiat Rutin/Proyek sebagai acuan kegiatan Rutin/Proyek.
- c. Mengadakan kunjungan ke perusahaan dan instansi pemerintah/swasta, kunjungan dimaksud untuk memperoleh data yang menyangkut ketenagakerjaan, data tersebut dikirim ke Pusat atau instansi yang membutuhkan sebagai masukan atau informasi yang diperlukan dan disebarluaskan lewat mesmedia, loket informasi dan sebagainya.
- d. Melaksanakan kegiatan koordinasi yang menyangkut perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan Bappeda Tk. I/Instansi terkait. Membuat/menyusun pertanggungjawaban Gubernur kegiatan rutin/pembangunan di bidang ketenagakerjaan memberikan data/informasi dan klarifikasi dengan DPRD Tingkat I maupun komisi DPR Pusat.
- e. Menyelenggarakan Rakorda/Rakerda jajaran Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur dan PT. Jamsostek yang dijadwalkan setiap triwulan atau waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- f. Menyelenggarakan Rapim setiap minggu yang hasilnya dikirim ke Pusat, bahan Rapim Kanwil Depnaker dan hasil Rapim Kandeptaker serta masukan dari sumber lain yang pemecahannya dikirim ke Pusat, setiap tahun membuat laporan sebanyak 52 buah dikirim melalui Faximile.

- g. Menyusun laporan bulanan, triwulan sebanyak 60 buku berdasarkan hasil rekapitulasi dari Kandep, Unit, Bidang, Bagian di lingkungan Kanwil Depnaker Jawa Timur.

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN

Kegiatan pembangunan/proyek di Binagram didukung dana APBN melalui Bagian Proyek IPTKD Jatim TA. 1999/2000 sebesar Rp.124.593.000,00
Hasil kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyuluhan dan penyebaran informasi meliputi :
- Konsultasi rencana program/proyek dan analisa keberhasilan proyek/program.
 - Penyusunan rencana program/proyek Tahun Dinas 2000
 - Penyusunan Lembar Informasi Ketenagakerjaan
 - Operasionalisasi Loker Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan
 - Identifikasi pengangguran Daerah Tingkat II Jawa Timur
 - Penyusunan profik ketenagakerjaan dan pemantauan ketenagakerjaan daerah

C. BIDANG LATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

1. KEGIATAN RUTIN

- a. Mengadakan kunjungan ke perusahaan, LLS, instansi pemerintah/swasta, pompres dalam rangka pembinaan monitoring kegiatan pelatihan dan sebagainya sebanyak 63 kali.
- b. Pembinaan instruktur, mengaktifkan POKJA dimasing-masing kejuruan 4 kali pertemuan per kejuruan.
- c. Mobilitas instruktur pada pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi luar Dikbud/Dinas P dan K Tingkat I Jawa Timur, kejuruan ekstra dan sepeda motor.
- d. Pengembangan metode latihan di BLKLN 10 orang instruktur.
- e. Penilaian angka kredit instruktur dalam dua semester.
- Semester I : 443 bendel
 - Semester II : 443 bendel
- f. Pemberian ijin tetap lembaga latihan swasta dan perusahaan 38 LLK
- g. Pemberian status akreditasi pada LLS dan LLP : 25 LLK
- h. Pemberian ijin status akreditasi BLKLN : 8 LLK dan pemberian ijin tetap BLKLN : 6 LLK
- i. Pelaksanaan UJK dan sertifikasi (TKI ke Luar Negeri) : 17.396 orang.
- j. Pelaksanaan UJK dan sertifikasi LLK dan SMK : 42.469 orang.
- k. Pelaksanaan UJK dan sertifikasi lulusan pekerja perusahaan : 169 orang.
- l. Penyusunan standart klasifikasi keterampilan dan materi uji ketrampilan.
- m. Pembentukan jaringan IPP on line system.
- n. Pemasyarakatan sertifikat keterampilan tenaga kerja pada bulan Desember 1999.
- o. Monitoring dan evaluasi BLKLN dan membuat peta BLKLN di Jawa Timur.

- p. Memberi penyuluhan promosi, pelayanan tentang prosedur dan evaluasi program pemagangan, jumlah peserta pemagangan sebagai berikut :
- Pemagangan standart : 576 orang
 - Pemagangan non standart : 1.769 orang
 - Pemagangan karyawan perusahaan ke luar negeri : 50 orang
 - Pemagangan ke Jepang : 158 orang
- q. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan program produktivitas instansi pemerintah/swasta, BLK/KLK/perusahaan
- r. Penyuluhan UP3
- s. Pelatihan Manajemen Kewirausahaan di pondok pesantren.
- t. Pembinaan lembaga latihan swasta
- u. Penempatan lulusan prosentase terbesar ada di perusahaan wiraswasta dan penempatan sebagai PNS yang .. dengan rincian sebagai berikut :
- BLK/LLK : PNS 20 orang, wiraswasta 2.900 orang, perusahaan 888 orang
 - LLS : Wiraswasta 55 orang, perusahaan 1.060 orang
 - LLP/Ponpres : Wiraswasta 5 orang, perusahaan 17 orang

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN

- a. Penyusunan Rencana Teknis
- b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
- c. Pengembangan Kelembagaan
 - Bentuk Pengelola Latihan Swasta
 - T O T
- d. Pengembangan System Informasi
 - Pengembangan Jejaring Pelatihan
 - Peningkatan Efektivitas Pelatihan setiap latihan di daerah
- e. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi
 Kegiatan tersebut di atas dilaksanakan oleh Bidang Lattas sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 BLK dan 13 LLKUM/LLKUI adalah kegiatan pelatihan industrial dan MTU.
 - Institusional : 3.264 orang, lulus 3.114 orang
 - MTU : 2.256 orang, lulus 2.106 orang
 Dana yang mendukung kegiatan tersebut sebesar Rp.4.957.662.000,00

D. BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA

1. KEGIATAN RUTIN

a. Informasi Bursa Kerja Terpadu

Kegiatan rutin pada bidang Pentakerja, penempatan tenaga kerja dan pemenuhan lowongan melalui prosedur Antar Kerja Umum, Antar Kerja Khusus dan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing :

1) Pencari Kerja

• Pencaker yang belum ditempatkan tahun lalu	:	123.510	orang
• Pencaker baru yang terdaftar tahun ini	:	380.744	orang
• Pencaker yang ditempatkan tahun ini	:	80.503	orang
• Pencaker yang dihapuskan tahun ini	:	92.218	orang
• Pencaker yang belum ditempatkan tahun ini	:	208.023	orang
• Sisa lowongan yang belum dipenuhi tahun ini	:	19.723	orang

2) a. Perijinan TKA Domestik

• Baru	:	-	orang
• Perpanjangan	:	13	orang
• Pindah Jabatan	:	1	orang

Jumlah	:	14	orang
--------	---	----	-------

b. TKWA Pendetang

• Baru	:	-	orang
• Perpanjangan	:	550	orang
• Pindah Jabatan	:	-	orang

Jumlah	:	550	orang
--------	---	-----	-------

3) Penyaluran Tenaga Kerja

• A K L	:	35.735	orang
• A K A D	:	9.063	orang
• A K A N	:	35.368	orang
• P T K P	:	337	orang

4) Bursa Kerja Khusus

Jumlah bursa Tahun Anggaran 1999/2000 yang telah mendapat izin sebanyak 84 satuan :

- Satuan Sekolah Kejuruan : 67 satuan
- Satuan Perguruan Tinggi : 3 satuan
- Satuan Lembaga Swasta : 10 satuan
- BLK/KLK : 4 satuan

Hasil Antar Kerja BKK

- Pencari kerja terdaftar : 75.433 orang
- Lowongan yang terdaftar : 5.588 orang
- Lowongan yang dipenuhi : 1.434 orang

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN

Proyek pelaksanaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran (PLKPP) di Jawa Timur TA. 1999/2000 sasaran proyek antara lain seleksi TKPMP, pengiriman dan penempatan, pendidikan dan pelatihan teknis, pembinaan ketenagakerjaan, penyebaran informasi, pemantauan dan pengendalian, penyelenggaraan evaluasi dan analisa.

Hasil kegiatan PLKPP TA. 1999/2000

NO	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Tehnologi Padat Karya Tehnologi Tepat Guna		
	PL-TPK	40	40
	Terapan TPK	100	100
	Penerapan/Pemandu TPK Terapan TPK Kelompok	400/20 40	400/20 40
2	Tenaga Kerja Mandiri		
	Pelatihan awal TKMT	225	225
	Pelatihan PL-TKMP	30	30
	Pelatihan TKPMP-PT	338	338
	Pelatihan TKPMP-UEP	22	22
	Lanjutan TKPMP-UEP Lanjutan TKPMP-PT	75 150	60 90

3	Penempatan Antar Kerja Dalam dan Luar Negeri		
	AKAD	12.500	4.899
	AKL	15.900	12.094
	Antar Kerja Khusus (Penca)	75	75
	TKA	75	75
	Analisa Jabatan	30	30
	PBJ	3.000	3.108
	BKK	60	60
	IPK	4.500	1.500

Dana APBN yang tersedia sebesar Rp.3.751.365.000,-

E. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA

I. KEGIATAN RUTIN

a. Sarana HIP dan kondisi hubungan industrial TA.1999/2000 sebagai berikut :

1) Serikat Pekerja :

- LKS SBSI : 1.096 buah
- Sanoumusi : 26 buah
- S P T P Swasta : 114 buah
- BUMN : 21 buah
- SBSI : 31 buah

2) Lembaga kerjasama

- LKS. Bipartit : 1.219 buah
- LKS Tripartit Tk. I : 1 buah
- LKS Tripartit Dati II : 37 buah
- Koperasi Karya : 1.339 buah

3) Organisasi Perusahaan

- Apindo : 30 buah

4) Pembentukan Peraturan Perusahaan dalam tahun anggaran 1999/2000 sebanyak 4.591 buah, sedangkan TA. 1999/2000 (3912 PP), maka terjadi peningkatan 679 PP atau 17,36 %

5) Pemutusan hubungan karena krisis moneter

- Jumlah perusahaan : 25 perusahaan
- TK yang di PHK : 33.031 orang

6) Jumlah kasus yang terjadi pada TA. 1999/2000 sebanyak 187 perusahaan, sedangkan pada TA.1998/1999 sebanyak 254 perusahaan atau menurun 65 perusahaan atau 25,59 %, dibandingkan tahun sebelumnya, jam kerja yang hilang TA.1999/2000 sebanyak 1.232.184 jam kerja. Sedangkan tahun yang lalu 2.723.208 jam, apabila dibandingkan dengan tahun yang lalu mengalami penurunan 1.474.4870 jam atau 54,16 %. Sedang jumlah tenaga kerja yang terlibat TA. 1999/2000 sebanyak 88.917 orang, dibandingkan tahun 1998/1999 sebanyak 138.583 orang, maka terjadi penurunan 135.639 orang atau 97,88%.

Sebab terjadinya Pemogokan/Unjukrasa.

NO	URAIAN	TA. 1999/2000
	TUNTUTAN NORMATIF	
1	UMR	6
2	Upah Lembur	13
3	Cuti Haid	15
4	Cuti Hamil	9
5	Cuti Tahunan	10
6	Jamsostek/Astek	24
7	PP/KKB	5
8	THR	1

Alasan Pemogokan (Normatif) TA. 1999/2000 sebanyak 83 kasus, sedangkan pada TA 1998/1999 sebanyak 204 kasus, jadi apabila dibandingkan ada penurunan sebesar 59,31 %

NO	URAIAN	TA. 1999/2000
	TUNTUTAN NON NORMATIF	
1	Kenaikan Upah	32
2	Uang Makan	48
3	Uang Transport	37
4	Pendirian Serikat Pekerja	8
5	Lain-lain	142

Alasan pemogokan Non Normatif TA. 1999/2000 sebanyak 267 kasus, dibandingkan dengan TA. 1998/1999 sebanyak 581 kasus, berarti ada penurunan sebanyak 314 kasus atau 54,04 %

7) Perselisihan Industrial

- Perselisihan Hubungan Industrial : 74 kasus
- Pemutusan Hubungan Kerja Perseorangan : 1.700 kasus
- Peutusan Hubungan Kerja : 27 kasus

8) Pelaksanaan UMR

Terhadap penetapan UMR yang baru, 7 perusahaan mengajukan penangguhan pelaksanaannya, setelah melalui proses penelitian, maka dari 7 perusahaan hanya 1 perusahaan yang ditolak.

Permemberlakuan UMR di Jawa Timur dikelompokkan menjadi 4 wilayah sebagai berikut :

- Wilayah I sebesar Rp.236.000,- terdiri dari Kodya Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab/Kodya Mojokerto, Kab/Kodya Malang, Kab/Kodya Probolinggo dan Kab/Kodya Pasuruan.
- Wilayah II sebesar Rp.212.000,- terdiri dari Kab/Kodya Kediri, Kab/Kodya Madiun, Kab. Magetan, Kab. Tuban, Kab. Ngawi, Kab. Sumenep dan Kab. Jember.
- Wilayah III sebesar Rp. 208.000,- terdiri dari Kab. Jombang, Kab. Situbondo, Kab. Nganjuk, Kab. Ponorogo, Kab. Tulungagung, Kab. Bondowoso, Kab. Bangkalan, dan Kab. Bojonegoro.
- Wilayah IV sebesar Rp. 160.000,- terdiri dari Kab. Trenggalek, Kab. Pacitan, Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, dan Kab/Kodya Blitar.

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN

a. Pengembangan Kelembagaan

- 1) Peningkatan mekanisme LK Tripartit Tingkat I sebanyak 12 kelompok
- 2) Peningkatan mekanisme LK Tripartit Tk II sebanyak 96 kelompok, sidang 48 pleno
- 3) Pembinaan Pengembangan dan pembentukan LKS Bipartit sebanyak 5 angkatan
- 4) Pembinaan dan pengembangan Kopkar sebanyak 5 angkatan
- 5) Pengembangan forum dialogis antar organisasi pekerja dan pengusaha dan LSM sebanyak 1 paket

- 6) Penerapan sistim deteksi dini Dati I secara Bipartit berjenjang sebanyak 250 perusahaan
- 7) Forum komunikasi, koordinasi Pegawai Perantara Panitia P4D/Pegawai Pengawas
- 8) Penerapan sistim deteksi dini Dati II (perusahaan rawan) sebanyak 240 perusahaan
- 9) Peningkatan usaha pro aktif (P4P) 6 lokasi
- 10) Pengkajian dan pengembangan sistim pengupahan sebanyak 1 paket
- 11) Peningkatan kinerja komisi pengupahan dan jamsos 7 lokasi

b. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

- 1) Penyebaran informasi melalui gelar kasus, 4 lokasi
- 2) Penyelesaian kasus PHI dan PHK oleh Pegawai Perantara, 556 kasus
- 3) Penyuluhan HIP, 24 kelompok
- 4) Pemasyarakatan HIP bagi pekerja dan pengusaha tingkat lanjutan, 4 angkatan
- 5) Pengembangan perjanjian kerja bagi pengusaha kecil, 150 perusahaan
- 6) Sarasehan UMR, 24 kelompok
- 7) Penyuluhan Astek kesejahteraan, 120 perusahaan
- 8) Pembentukan dan perbaikan syarat kerja pada BUN/BUMD, 50 perusahaan
- 9) Pengawasan supervisi konstruksi
- 10) Evaluasi dan realisasi data aspek kesejahteraan, 20 perusahaan
- 11) Evaluasi dan analisa hasil penyuluhan kerawanan PHI/PHK, 556 kasus
- 12) Evaluasi dan analisa data penetapan kerawanan perusahaan, 235 perusahaan
- 13) Evaluasi dan analisa pengetahuan unjukrasa di 45 perusahaan

Dana yang mendukung dari APBN TA. 1999/2000 sebesar Rp.1.070.007.000,-

F. BIDANG PENGAWASAN DAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA JAWA TIMUR

1. KEGIATAN RUTIN

- a. Jumlah perusahaan di Jawa Timur TA. 1999/2000 berdasarkan UU. No. 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan sebanyak 26.647 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1.800.979 orang tenaga kerja. Apabila dibandingkan dengan TA. 1998/1999 sebanyak 26.591 perusahaan, ada kenaikan relatif kecil yaitu 56 perusahaan atau 0,42 %, namun untuk jumlah tenaga kerja pada TA. 1998/1999 sebanyak 1.664.263 orang, berarti ada kenaikan sebesar 136.716 atau 8,21 %
- b. Jumlah Perusahaan di Jawa Timur selama TA 1999/2000 menurut status :
 - PMDN : 2.542 perusahaan
 - PMA : 903 perusahaan
 - Perorangan : 20.495 perusahaan
 - Lain-lain : 2.707 perusahaan

c. Jumlah perusahaan menurut jumlah tenaga kerja :

• < 10 orang	:	9.872	perusahaan
• 10 – 24 orang	:	7.281	perusahaan
• 25 – 49 orang	:	3.525	perusahaan
• 50 – 100 orang	:	2.366	perusahaan
• > 100 orang	:	3.609	perusahaan

d. Frekuensi hasil pengawasan dan pemeriksaan se Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Pertama :	1.123	perusahaan
2) Pemeriksaan Berkala :	4.646	perusahaan
3) Pemeriksaan Khusus :	4.080	perusahaan
• PO Box 5000	:	2
• Pesawat Uap/Bejana Tekan	:	4.179
• Kebakaran listrik/petir	:	385
• Pesawat Angkat/Angkut	:	3.430
• Kecelakaan Kerja/Jamsostek	:	-
• Penampungan PJTKI	:	14

Perdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas pada TA. 1999/2000 sebanyak 9.849 perusahaan, apabila dibandingkan dengan jumlah Pegawai Pengawas yang ada sekarang 125 orang, maka hasil pemeriksaan setiap Pegawai Pengawas adalah 6 perusahaan/bulan. Jika hal ini dikaitkan dengan target yang dibebankan yaitu 8 perusahaan/Pegawai Pengawas/Bulan, perolehan pemeriksaan baru mencapai 75 %. Target yang dibebankan oleh Depnaker Pusat yaitu 12.000 perusahaan, maka pemeriksaan mencapai 81,4 %

e. Pelanggaran

Dari hasil pemeriksaan terhadap 9.845 perusahaan ditemukan 11.464 pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran Norma Umum 7.400 perusahaan dan Norma Khusus 4.064 perusahaan.

f. Pembinaan

Maksud daripada pembinaan pengusaha dan pekerja agar pengusaha dan pekerja mengerti akan peranan masing-masing, dengan mengerti akan peranannya diharapkan tercipta ketenangan, kenyamanan melakukan peningkatan kinerja yang masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dan kesejahteraan :

1.) Pembinaan terhadap pengusaha

Dalam TA 1999/2000 telah dilakukan pembinaan terhadap 3.271 perusahaan. Adapun materi yang diberikan antara lain UMR, Norma Kerja, Jamsostek, Kebakaran, P2K3 dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.

2) Pembinaan terhadap tenaga kerja

Pembinaan terhadap tenaga kerja mencapai 101.200 orang tenaga kerja, materi yang disampaikan adalah UMR, Norma Kerja, Jamsostek, Kebakaran, P2K3 dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.

3) Pembinaan terhadap Kandepnaker

Pembinaan yang dilakukan meliputi teknis operasional pengawasan dari 23 Kandepnaker, hal ini dilakukan disebabkan masih ditemukannya, antara lain :

- Mekanisme surat menyurat yang belum tertib.
- Nota Pemeriksaan tidak segera diselesaikan setelah pemeriksaan dilakukan atau Nota Pemeriksaan tidak dibuat.
- Hasil pelaporan pemeriksaan tidak sesuai dengan rencana yang dibuat.
- Tidak semua kegiatan dilaporkan ke Kanwil secara fungsional.

4) P2K3 di perusahaan dengan tenaga kerja 100 lebih yang telah terbentuk sebanyak 2.729 perusahaan dari 3.609 perusahaan.

P2K3 yang telah terbentuk pada TA. 1999/2000 sebesar 2.605 perusahaan, dibanding dengan TA. 1998/1999 yang sebanyak 2.477 perusahaan, berarti ada kenaikan 5,16 %.

Kegiatan yang dilaksanakan TA. 1999/2000 telah menghasilkan 17 perusahaan Nihil Kecelakaan, sedang 3 perusahaan memperoleh sertifikat SMK3 di Istana Negara.

5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Deteksi perusahaan, jumlah pelayanan kesehatan kerja yang sudah mendapatkan dan masih berlaku sesuai dengan UU No. 1/1970 sebanyak 59 perusahaan dan Dokter Pemeriksa Kesehatan 58 orang.

6) PT. Jamsostek

Jumlah perusahaan yang wajib dan sukarela mengikuti program jamsostek sebanyak 14.599 perusahaan. Perusahaan wajib jamsostek diatas 10 tenaga kerja menurut UU No. 7/1981 adalah 16.781 perusahaan atau 87 % dengan jumlah tenaga kerja 1.999.920 tenaga kerja dari 1.946.742 tenaga kerja atau 103 %

7) Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja yang terjadi pada TA. 1999/2000 sebanyak 6.029 kasus dengan jumlah 6.048 orang dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| • Luka Ringan | : | 4.137 orang |
| • STMB | : | 1.088 orang |
| • Luka Berat Cacat | : | 748 orang |
| • Meninggal Dunia | : | 75 orang |

8) Jaminan/Santunan Kecelakaan Kerja

Jumlah jaminan atau santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan kerja dari PT. Jamsostek sebagai berikut :

- Jaminan Kecelakaan Kerja : Rp. 1.228.211.237,78
- Jaminan Hari Tua : Rp. 5.027.225.858,31
- Jaminan Kematian : Rp. 333.200.000,00

9) Pengembangan dan Pengajian

Jumlah perijinan, pengkajian dan pengesahan yang diterbitkan dalam kurun TA. 1999/2000 adalah sebagai berikut :

- a) Pengkajian, permohonan ijin penyimpanan waktu kerja sebanyak 214 perusahaan dengan melibatkan tenaga kerja sebanyak 94.861 orang.
- b) Pengkajian permohonan
 - Pesawat Uap : 249 buah
 - Pesawat Angkat/Angkut : 551 buah
 - Bejana Tekan : 414 buah
 - Listrik : 99 buah
 - Lift : 5 buah
 - Penangkal Petir : 75 buah
 - Mesin Diesel : 70 buah
- c) Pengkajian perusahaan pelayanan kesehatan kerja 12 perusahaan.
- d) Pengkajian rekomendasi pemakaian pestisida terbatas 4 perusahaan.
- e) Program penilaian perusahaan Kecelakaan Nihil dari 23 Kandepnaker yang tidak mengikuti penilaian Kecelakaan Nihil baru 6 Kandepnaker yang bisa diikuti tingkat nasional, kemudian dari 17 perusahaan dan 3 perusahaan mengikuti SMK3.
- f) Kegiatan seminar yang diselenggarakan untuk meningkatkan fungsi dan pelaksanaan.

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bagian Proyek Pengembangan Kondisi Lingkungan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja TA. 1999/2000 tersedia dana sebesar Rp. 289.311.000,-

Rincian Kegiatan :

a. Penyusunan Naskah Buku lainnya

- 1) Petunjuk teknis pengolahan di pengumpulan data wajib lapor ketenagakerjaan.
- 2) Penyusunan naskah petunjuk teknis pengawasan penggunaan lift.

- 3) Naskah petunjuk teknis pengawasan dan analisa kecelakaan kerja, kebakaran dan peledakan.
- 4) Penyusunan naskah buku informasi K3

b. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

- 1) Peningkatan peran dan fungsi P2K3.
- 2) Penyuluhan dan pembentukan P2K3.
- 3) Penyuluhan bagi perusahaan penyelenggara pelayanan kesehatan kerja.
- 4) Penyuluhan penerapan SMK3 bagi perusahaan.
- 5) Peningkatan kemampuan dan evaluasi AK3.
- 6) Pelatihan K3 bagi pengelola gedung bertingkat untuk jasa pelayanan umum.
- 7) Penyuluhan norma perlindungan calon TKI.
- 8) Penyuluhan dan pembentukan kader norma kerja.
- 9) Penyuluhan norma perlindungan bagi anak.
- 10) Penyuluhan hak dan kewajiban nakerwan.

c. Pengawasan/Supervisi Konstruksi

- 1) Audit JPK Jamsos pelaksanaan perusahaan.
- 2) Penyidikan/Pembuatan BAP.
- 3) Pengawasan KMW, Tenaga Kerja Anak, Tenaga Kerja Asing, UMR, Jamsostek, PJTKI, Putusan P4D/P4P, Kasus Norma Kerja.
- 4) Pengawasan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Kerja.
- 5) Pengawasan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya.
- 6) Pemantauan Kktivitas P2K3.
- 7) Pelaksanaan Pengawasan Konstruksi Bangunan dan Galian.

Dana yang mendukung kegiatan pembangunan proyek dari dana APBN sebesar Rp.289.311.000,-

G. BALAI HIPERKES DAN KESEHATAN KERJA JAWA TIMUR

1. KEGIATAN RUTIN

- a. Mengatur tentang kepegawaian yang menyangkut cuti, mutasi, usulan kenaikan pangkat, usulan gaji berkala dan lain-lain.
- b. Memperlancar arus surat menyurat.
- c. Melaksanakan kegiatan yang didanai oleh DIK dan penggunaannya, meliputi pemeliharaan kantor dan prasarana lainnya.
- d. Mengadakan pelatihan dengan instansi/masyarakat, sektor perkantoran 40 orang ; sektor perkayuan 20 orang dan sektor industri (kimia) 40 orang.
- e. Perpustakaan memperbanyak koleksi buku-buku perpustakaan khususnya buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah ketenagakerjaan. Diharapkan fungsi dan peran perpustakaan tersebut menarik bagi masyarakat umum dan dunia universitas.

f. Monitoring Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan yang meliputi :

- Faktor fisik di sektor industri pengolahan 20 perusahaan.
- Faktor kimia di sektor industri pengolahan 20 perusahaan.
- Pemeriksaan kesehatan lingkungan industri kecil sektor industri pengolahan 2 perusahaan.

2. PENDAYAGUNAAN FASILITAS BALAI HIPERKES
(DANA DIK-S)

PELAYANAN JASA

- Pengukuran Udara Ambein di sektor industri pengolahan 20 perusahaan.
- Pengukuran Emisi (Cerobong) sektor industri pengolahan 96 perusahaan.
- Pengukuran Lingkungan Kerja di sektor industri pengolahan 25 perusahaan
- Memberi bantuan teknik pengukuran ambein sektor industri pengolahan 111 perusahaan, listrik, air dan gas 4 perusahaan.
- Pengukuran emisi cerobong di sektor industri listrik, air dan gas 4 perusahaan
- Pelatihan bagi dokter perusahaan 58 orang dari 15 perusahaan.
- Membantu Departemen Kesehatan pemeriksaan anemia gizi tenaga kerja wanita 100 orang.

DUNIA UNIVERSITAS

- Membantu mahasiswa dalam pemeriksaan Faal paru-paru tenaga kerja sebanyak 40 orang dan Faal ibu rumah tangga sebanyak 60 orang.
- Membantu mahasiswa S2 dan mahasiswa pembuatan thesis/skripsi.
- Memeriksa masyarakat umum sebanyak 1.999 orang.
- Memberi kuliah mahasiswa S1 Universitas Wijaya Kusuma dan mahasiswa PKL.
- Menyelenggarakan, mempersiapkan anggota assosiasi untuk menghadapi diberlakukannya berbagai standarisasi yang diikuti 222 orang peserta.
- Menyelenggarakan *In House Training* dengan PT. Semen Gresik dan Tuban 195 orang, PT. Unilever Indonesia Surabaya 70 orang.
- Menerima 15 orang S2 dari UBAYA untuk study laboratorium.

3. KEGIATAN PEMBANGUNAN/PROYEK

Dana proyek TA.1999/2000 sebesar Rp.124.420.000,-
Rincian Kegiatan :

1. Pengukuran dan Pemeriksaan di Sektor Industri Pengolahan :

- | | | | |
|---------------|---|---|------------|
| • Iklim Kerja | : | 5 | perusahaan |
| • Kadar Debu | : | 8 | perusahaan |
| • Kebisingan | : | 5 | perusahaan |
| • Penerangan | : | 5 | perusahaan |

- Getaran Mesin : 5 perusahaan
- Jasa kemasyarakatan sosial : 43 perusahaan dan perorangan kader

2. Penyebaran Informasi :

Pelatihan Hiperkes dan Kesehatan Kerja di Daerah Tingkat II :

- Kandeptaker Bojonegoro : 24 orang 22 perusahaan
- Kandeptaker Tulungagung : 24 orang 20 perusahaan
- Kandeptaker Ponorogo : 25 orang 11 perusahaan
- Kandeptaker Bangkalan : 24 orang 14 perusahaan

H. KEPANITERAAN P4D JAWA TIMUR

1. KEGIATAN RUTIN

- Perkara Perselisihan Industrial menurut UU No. 22 Tahun 1957

Sisa Perkara per 31 Maret 1999	:	6	perkara
Perkara yang masuk	:	69	perkara
Perkara yang diselesaikan	:	66	perkara
Sisa Perkara	:	9	perkara

- Perkara Perselisihan Industrial menurut UU No. 12 Tahun 1964

Sisa Perkara per 31 Maret 1999	:	94	perkara	135	tk
Perkara yang masuk	:	675	perkara	856	tk
Perkara yang diselesaikan	:	637	perkara	837	tk
Sisa Perkara	:	132	perkara	154	tk

- Permohonan Banding/Pemeriksaan Ulang PHI

Oleh pihak pengusaha	:	10	perkara
Oleh pihak pekerja	:	8	perkara
Oleh pihak pengusaha & pekerja	:	2	perkara
Jumlah	:	20	perkara

- PHK

Oleh pihak pengusaha	:	157	perkara
Oleh pihak pekerja	:	47	perkara
Oleh pihak pengusaha & pekerja	:	14	perkara
Jumlah	:	218	perkara

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN/PROYEK

Kegiatan pembangunan/proyek PHIPTK P4D Jawa Timur dana APBN yang tersedia sebesar Rp.113.860.000,- dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :

- Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
- Pengawasan/Supervisi Konstruksi

I. BALAI ANTAR KERJA ANTAR NEGARA (AKAN)

1. KEGIATAN RUTIN

a. Penyerapan/Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri

Penempatan TKI di Luar Negeri melalui program AKAN TA. 1999/2000 tercatat sebanyak 39.849 orang yang terdiri dari laki-laki 4.481 orang, sedang tenaga kerja wanita 35.368 orang.

Dibandingkan TA. 1998/1999 yang sebanyak 65.303 orang, berarti ada penurunan hampir 50 %.

Dilihat dari jenis jabatan pengiriman ke Luar Negeri masih didominasi oleh jabatan pembantu rumah tangga.

Tujuan negara yang paling besar diminati ke Malaysia, Hongkong, Singapura dan sisanya Arab Saudi, Taiwan, Korea.

b. Lembaga yang menangani TKI di Jawa Timur

- | | | | |
|--------------------|---|----|------------|
| • PJTKI | : | 23 | perusahaan |
| • Perwakilan PJTKI | : | 30 | perusahaan |
| • BLKLN | : | 8 | perusahaan |

Remiten/pengiriman uang dari TKI ke Jawa Timur melalui Bank di Jawa Timur TA. 1999/2000 sebesar \$ 1.673.658 sedang TA 1998/1999 sebesar \$ 281.863.682 berarti ada kenaikan 493,78 %

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN

Mengadakan pembinaan PJTKI beserta perangkatnya.

- Mengadakan penyuluhan CTKI di Kandep dan di Kecamatan/lokasi rekrutmen.
- Monitoring dan penyuluhan.
- Penyebaran informasi melalui media cetak, elektronik, leaflet dan brosur.

Dana yang mendukung kegiatan proyek dari APBN TA. 1999/2000 sebesar Rp.124.732.000,-

J. BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS DAERAH JAWA TIMUR

1. KEGIATAN RUTIN

- a. Menyelenggarakan pelatihan bagi 7 kelompok dengan 175 orang peserta.
- b. Pelatihan Kewirausahaan 6 kelompok/150 orang
- c. Pelatihan Supervisi di 7 Dati II Jawa Timur

2. KEGIATAN PEMBANGUNAN

Jumlah anggaran yang tersedia lewat APBN sebesar Rp.418.155.000,-

• Pelatihan Produktivitas	:	3	kelompok
• Pelatihan TOT	:	1	kelompok
• Kewirausahaan	:	6	kelompok
• Pelatihan AMT	:	4	kelompok
• Pelatihan APO	:	1	kelompok
• Pembinaan dan Konsultasi Managemen Bagi Usaha Kecil Dan Menengah	:	70	perusahaan/4 kali
• Pengembangan Kelembagaan			
- Jejaring produktivitas	:	20	perusahaan
- Pengembangan UP3	:	6	kelompok
- Klinik produktif	:	2	
- Pembinaan produktivitas	:	800	expl
- Analisa produktivitas	:	-	

BAB III

MASALAH/HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Rutin/Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 di jajaran Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur masih banyak menghadapi hambatan/permasalahan.

Hambatan dan permasalahan yang ada kaitannya dengan keterbatasan personil terutama mutu/kualitas, sarana dan fasilitas masih mewarnai dalam pelaksanaan program, namun hal tersebut secara intensif diupayakan pemecahannya secara semaksimal mungkin.

Permasalahan yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha

- a. Ketepatan dan kecepatan penyerahan surat dan laporan ke Bidang/Unit sudah sangat baik, namun ketepatan, kecepatan tanggapan atas surat dan laporan tersebut di bidang/unit masih perlu ditingkatkan. Untuk masalah tersebut perlu adanya pembinaan sikap tanggap akan arti pentingnya pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Alokasi personil baik staf/pejabat struktural dan pegawai fungsional masih perlu ada penataan yang lebih baik lagi, penataan yang seimbang jumlah personil, beban pekerjaan, kinerja yang diperoleh/dihasilkan dan kemanfaatan, sehubungan beberapa hal antara lain :
 - Beberapa kegiatan yang urgen/penting yang harus ditangani oleh pegawai yang berkualitas.
 - Demi kemajuan dan bobot permasalahan yang sering timbul di Dati II.
 - Menjawab tantangan reformasi di bidang ketenagakerjaan perlu ada revitalisasi dan reposisi disegala lini kegiatan di seluruh unit jajaran Kanwil Depnaker Jawa Timur.

2. Bidang Binagram

Dukungan data pihak intern/extern kaitannya dengan penyusunan program dan laporan masih belum sebagaimana yang diharapkan.

3. Bidang Latihan dan Produktivitas

- a. Latihan di BLK/LKUM, LLKI, LLS sifatnya masih basic training, sehingga latihan belum bisa menjawab tantangan teknologi, disamping krisis yang belum kunjung selesai, sulit untuk penempatan khusus LLS kurang dapat berdayaguna disebabkan kesulitan rekrutmen siswa.
- b. Masih kurang sadarnya para pengusaha akan arti pentingnya pemasyarakatan peningkatan produktivitas kerja, sehingga pelatihan magang dan produktivitas belum seperti yang diharapkan.

- c. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sertifikasi tenaga kerja masih kurang, disamping itu pengakuan akan arti pentingnya sertifikat dan masyarakat masih kurang.

4. Bidang Pentakerja

- a. Petugas Antar Kerja belum melaksanakan tugas secara maksimal, sehingga lowongan kerja yang ada tidak terisi. Disamping itu mekanisme pasar kerja belum berfungsi secara baik dan banyak perusahaan belum memenuhi Wajib Laport Tenaga Kerja.
- b. Masih banyaknya TKI ilegal dan tenaga AKAN yang direkrut secara liar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, disamping perlindungan ditempat kerja masih kurang, sehingga banyak kasus di Luar Negeri.
- c. Kuntaiunitas pembinaan terhadap TKPMT dan TKPMP belum optimal sehingga yang bersangkutan didalam mengembangkan usaha gagal/kurang berhasil dengan baik.

5. Bidang Hubinsyaker

Dibidang Hubinsyaker kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Prinsip HIP telah banyak dipahami oleh para pengusaha, namun jumlah pengusaha yang melaksanakan HIP secara baik masih relatif kecil.
- b. Menjamurnya LSM dan organisasi buruh yang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan, disamping itu belum banyak pengalaman, sehingga aktivitasnya tidak terarah cenderung brutal dan anarkis hanya sekedar menarik perhatian masyarakat dan kelompoknya.
- c. Banyak penyelesaian kasus ketenagakerjaan salah alokasi, yang seharusnya penyelesaiannya ke Depnaker namun kasus tersebut dibawa ke pihak legislatif, sedang pihak legislatif belum/tidak menguasai peraturan tentang penyelesaian kasus dimaksud, akibatnya penyelesaian kasus berlarut-larut, mengganggu suasana kerja di perusahaan.

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

- a. Jumlah pegawai pengawas yang belum sebanding dengan jumlah kegiatan dan perusahaan perlu optimalisasi petugas pengawas.
- b. Peningkatan SDM (profesionalisme) bagi pegawai pengawas.
- c. Peningkatan kesejahteraan karyawan disamping menjadi anggota Jamsostek perlu pengembangan koperasi karyawan dan sebagainya.

BAB IV

EVALUASI/ANALISA

1. BAGIAN TATA USAHA

- a. Peranan/Fungsi jajaran tata usaha sebagai unit pendukung bidang dan kegiatan teknis dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan.

Hal tersebut terlihat :

- Tertib administrasi yang meliputi antara lain keuangan, kepegawaian, surat menyurat termasuk kearsipan dan sebagainya.
- Peningkatan, percepatan, ketepatan waktu pendistribusian ke unit/bidang.
- Ketepatan/kecepatan waktu pelayanan surat ke masyarakat, instansi dan ke departemen.
- Penyelesaian angka kredit pegawai fungsional, tepat waktu dan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan sebagainya.

- b. Pembinaan dan Pengembangan personil :

- Pembinaan dan pengembangan pegawai semakin baik, antara lain usulan kursus DJJ maupun yang lain makin tinggi minat peserta.
- Stabilitas pegawai jajaran Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur tidak larut dalam gejolak politik dalam situasi krisis.
- Penunjukan/Pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional dalam Jakat yang ketat, sehingga diperoleh personil yang baik.
- Pembinaan/mutasi personil yang indisiliner dan mutasi personil yang potensial ke Kandep yang rawan dan sarat kegiatan.
- Upaya peningkatan disiplin lewat sambungrasa, apel dan pembinaan mental spiritual.
- Perlu perhatian terhadap pegawai yang rawan individu akibat krisis.
- Tingkat hukuman kuantitas, kualitas ^{dan} peningkatan pembinaan pegawai perlu perhatian.

2. BIDANG BINAGRAM

Meskipun kecepatan, ketepatan waktu akan akurasi data baik intern jajaran Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur maupun ekstern merupakan kendala dengan berbagai upaya dapat diatasi.

3. BIDANG LATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

- Terjadi peningkatan mutu instruktur BLK, LLKI, LLKUM, BPPD dengan ditingkatkan melalui jenjang D3, S1, S2 bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.
- Pada TA. 1999/2000 kegiatan UJK untuk CTKI sebanyak 17.396 orang, sedang TA. 1998/1999 sebanyak 17.088 orang berarti ada kenaikan 1,80 %.
- Tahun Anggaran 1999/2000 kegiatan UJK untuk siswa LLS, SMK 42.469 orang, TA. 1998/1999 sebanyak 16.141 orang berarti ada kenaikan sebesar 163,11 %.
- Diperlukan sosialisasi peranan sertifikasi ke perusahaan yang tujuannya peningkatan upah bagi karyawan yang bersertifikat.

4. BIDANG PENTAKERJA

- Jumlah penempatan tenaga kerja TA. 1999/2000 sebanyak 80.503 orang dan pada TA. 1998/1999 sebanyak 96.300 orang, bila dibandingkan berarti ada penurunan sebesar 16,40 %. Bahwa penempatan sebanyak 80.503 orang terdiri melalui AKAL, AKAN, AKAD, PTKP dari berbagai kegiatan penempatan yang paling tajam penurunannya adalah penempatan melalui AKAN, TA. 1999/2000 sebanyak 35.368 orang sedang penempatan TA. 1998/1999 sebanyak 65.303 orang berarti penurunannya sebesar 45,84 %. Penurunan tajam penempatan di Luar Negeri akibat dampak krisis ekonomi dimana CTKI sulit memperoleh biaya untuk ke Luar Negeri dan banyaknya kasus TKI di Luar Negeri.
- Penempatan AKAD
Penempatan tenaga kerja melalui proses Antar Kerja Antar Daerah TA. 1999/2000 sebanyak 9.063 orang, sedang TA. 1998/1999 sebanyak 20.750 orang berarti ada penurunan 56,32 % hal ini akibat dampak politik dan masalah etnis pendatang.
- Penyuluhan jabatan masih sangat dibutuhkan, baik untuk kepentingan intern dan ekstern dalam penataan personil dan dalam penempatan yang tepat sesuai dengan pengisian lowongan jabatan.

5. BIDANG HUBINSYAKER

- a. Dalam kondisi krisis ekonomi dan politik, situasi ketenagakerjaan di Jawa Timur sepertinya hampir tidak terkendali, namun berkat kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait serta kerjasama dengan penegak hukum lainnya situasi ketenagakerjaan di Jawa Timur dapat dikendalikan/terkendali.

Agar situasi ketenagakerjaan stabil dan terkendali pembinaan dan pendekatan kepada pihak pengusaha/pekerja, eksekutif dan legislatif terus ditingkatkan.

Pemutusan karena situasi moneter di Jawa Timur TA. 1999/2000 :

- Jumlah perusahaan : 225 perusahaan
- Jumlah TK yang di PHK : 33.031 orang

- b. Penyebab unjukrasa TA. 1999/2000 di Jawa Timur telah bergeser dari tuntutan normatif sebanyak 83 kasus, non normatif 267 kasus.
Disamping hal itu tumbuhkembangnya forum/LSM, serikat pekerja di Jawa Timur dimana para pengurusnya belum pengalaman dan menguasai akan perantaraan dan perundang-undangan ketenagakerjaan, sering memicu instabilitas situasi ketenagakerjaan, dimungkinkan juga adanya pengaruh pihak ketiga.
Dalam penanggulangan gejala ketenagakerjaan pembinaan, koordinasi lebih ditingkatkan.

6. BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Dengan peningkatan intensitas pengawasan dan peningkatan kemampuan pegawai pengawas serta dikembangkan variabel pemeriksaan dari pihak perusahaan nampaknya mulai menyadari akan fungsi/peranan pengawasan. Sedikit banyak memberi warna dan perubahan pada kondisi penerapan peraturan dan perundang-undangan.
Jumlah santunan Jamsostek yang dibayarkan terlihat bahwa kenaikan pembayaran santunan hari tua. Hal ini mengindikasikan bahwa TA. 1999/2000 banyak pengurangan pegawai karena pensiun, disamping angka kuantitas dan kecelakaan kerja relatif lebih tinggi daripada TA. 1998/1999, bahwa dalam TA. 1999/2000 menggambarkan adanya peningkatan jumlah kasus tenaga kerja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Jajaran ketata-usahaan dalam melaksanakan fungsi dan peranannya sebagai unsur penunjang operasional dibidang teknis semakin meningkat. Utamanya dalam pelayanan surat menyurat dengan Pusat, pihak ketiga/masyarakat dan instansi terkait.
2. Tahun Anggaran penyusunan DUP, DURK, DUK dan Renlakgiat sudah bukan permasalahan lagi.
3. Realisasi target penempatan khususnya pelaksanaan Antar Kerja Antar Negara TA. 1999/2000 ada penurunan lebih dari 50 %.
4. Target pelatihan tercapai namun penempatan masih relatif kecil.
5. Kondisi hubungan industrial di Jawa Timur terkendali walaupun masih diwanai banyak unjukrasa.
6. Secara umum pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rutin dapat selesai sesuai target penjadwalan pelaksanaan.

B. SARAN

SDM pegawai khususnya pegawai fungsional perlu ditingkatkan.